



# Buletin Parlementaria

Nomor 1115/I/VIII/2020 • Agustus 2020



## DPR Dukung Kementan Tingkatkan Produksi Pertanian Lampung



5 Program PEN Butuh Upaya Komprehensif Semua Elemen Bangsa



8 UU Pilkada Harus Ramah bagi Calon Pemimpin Potensial



9 772614 339005

# DPR Dukung Kementan Tingkatkan Produksi Pertanian Lampung

**K**etua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, Pemerintah saat ini terus menggalakkan program peningkatan produksi tanaman pangan. Untuk itu, ia akan mendukung program Kementerian Pertanian RI dalam menggenjot peningkatan produksi pangan agar bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Hal ini dikatakan Sudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI melakukan panen raya jagung di lahan seluas 250 hektar milik Kelompok Tani Maju, Desa Marga Catur, Kalianda, Lampung Selatan, Senin (20/7). Kunjungan ini untuk menyerap aspirasi langsung dari petani sehingga Komisi IV DPR RI dapat bersinergi dengan Kementan RI guna mencari solusinya.

“Kami tidak mau petaninya tidak sejahtera. Jika hasil panen bagus, harusnya petani memperoleh keuntungan dan bisa memenuhi

kebutuhan. Tapi kalau hasilnya tidak bagus, maka kami Komisi IV DPR RI mengambil terobosan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada walaupun tidak populer, kami menyetop semua bibit yang tidak unggul. Karena kami sering mendapat aduan dari petani mengenai bibit yang kurang baik,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Selama ini ketika panen raya petani menjual jagung dengan harga yang kurang menguntungkan, dan itu tidak menjamin peningkatan kesejahteraan petani. Untuk itu, legislator dapil Lampung I ini menyebutkan, pihaknya tidak hanya mendorong Pemerintah untuk menyalurkan bantuan bibit yang bagus, namun juga bantuan mesin pengering jagung, sehingga petani bisa menjual jagung dengan harga berlipat.

“Petani tidak lagi menjual jagung dalam bentuk basah, kami bantu alat pengering dari Pemerintah. Di sini

ada Pak Dirjen Tanaman Pangan siap membantu dan untuk angkut hasil dari lokasi ke penjual kalau pakai motor roda 3 jauh lebih gampang. Ini akan menjadi perhatian Komisi IV DPR RI,” ungkapnya.

Untuk penetapan harga jagung, Sudin secara langsung meminta kepada Dirjen Tanaman Pangan Kementan untuk mengajak para pemain besar (pengusaha) jagung untuk dimintai masukan saat rapat dengan Komisi IV DPR RI. “Kalau beli terlalu rendah, berarti harus dihitung ulang lagi sebab harus dihitung berapa biaya yang dikeluarkan petani. Petani dan pedagang harus sama-sama untung,” harap Sudin.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menjelaskan, sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani Kementan RI berkomitmen menyalurkan bantuan untuk budidaya dan penanganan pasca panen.

Kemudian bantuan dana kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Lampung hingga saat ini berjalan optimal, yakni Rp 1,2 triliun atau peringkat 4 terbesar di Indonesia. “Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten penyuplai bahan pokok terutama beras dan jagung untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi wilayah Lampung bahkan di luar daerah. Jadi kami terus mendorong berbagai bantuan atau kemudahan untuk petani,” ujarnya.

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPR RI bersama Kementan RI yang menaruh perhatian khusus pada peningkatan produksi jagung di Lampung Selatan. Ia menilai kunjungan kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementan ini dapat menaikkan semangat petani Lampung Selatan untuk terus menopang kebutuhan jagung secara nasional. ■ man/es



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Bupati Lampung Selatan, Kementan RI, serta Kelompok Tani di Kalianda, Lampung Selatan. Foto: Andri/IAN



# DPR Awasi Komite Penanganan Covid-19 dan PEN



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Yoga/MAN

**P**andemi Covid-19 terus mengalami peningkatan jumlah kasus di sebagian besar belahan dunia termasuk Indonesia. Pemerintah pun diketahui telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan ekonomi.

Menanggapi pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dalam waktu dekat DPR RI akan segera menggelar rapat dengan Pemerintah untuk mengawasi komite itu dalam masa sidang mendatang.

”

**SEBAGAI LEMBAGA TINGGI YANG JUGA MEMILIKI FUNGSI PENGAWASAN, DALAM MASA SIDANG KAMI NANTI AKAN MENGADAKAN RAPAT DENGAN PEMERINTAH UNTUK MEMBAHAS HAL INI**

“Dengan kasus Covid-19 yang semakin meningkat, tentunya sebagai lembaga tinggi yang juga memiliki fungsi pengawasan, dalam masa sidang kami nanti akan mengadakan

rapat dengan Pemerintah untuk membahas hal ini,” ujar Dasco kepada awak media, di selasar Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7).

Politisi F-Gerindra ini menekankan, DPR RI juga akan melakukan fungsi pengawasan dengan memperhatikan implementasi dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah masyarakat. Yaitu, pengawasan baik dari segi peraturan maupun langkah kerja dari komite itu.

“Walaupun di pekan lalu, Pemerintah juga sudah membentuk lembaga baru yaitu Komite Penanganan Covid-19 dan PEN. Namun, kami masih ingin melihat nanti implementasinya di lapangan baik implementasi terhadap aturan tersebut maupun kerja-kerja dari Komite Penanganan Covid-19,” pungkask legislator dapil Banten III itu. ■ pun/sf

# Program PEN Butuh Upaya Komprehensif Semua Elemen Bangsa

**W**akil Ketua DPR RI A. Muhaimin Iskandar menyarankan kepada Pemerintah agar melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM dan mendorong gerakan bangsa buatan Indonesia. Menurutnya upaya membangkitkan perekonomian melalui koperasi dan UMKM membutuhkan kerja sama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang dibarengi dengan berbagai upaya pendekatan. Tidaklah cukup dengan bantuan pembiayaan saja. Dibutuhkan langkah yang komprehensif dan kebijakan yang tepat untuk dapat memanfaatkan dana yang cukup besar sehingga berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi.

“Kita mengapresiasi kebijakan pemerintah membentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sinergitas dengan semua komponen harus dilakukan. Tidak terkecuali UMKM. Anggaran Program PEN bagi koperasi dan UMKM mencapai Rp 123 triliun. Dana itu dialokasikan untuk relaksasi, subsidi bunga kredit usaha rakyat serta program-program pemulihan ekonomi lainnya,” papar Gus Ami sapaan akrab Muhaimin Iskandar dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, Senin (27/7).

Menurutnya pemulihan ekonomi nasional membutuhkan upaya komprehensif semua elemen bangsa dari pusat sampai dengan daerah. Gus Ami mengharapkan pemerintah membuat skema yang matang untuk membuka pemasaran dan pendampingan terhadap

pelaku UMKM, ini yang paling utama karena dapat mengatasi lesunya permintaan. Pemda diharapkan bisa membuat kebijakan terobosan yang bisa mengatur pemasaran dan sirkulasi atau distribusi barang dari pelaku-pelaku UMKM.

“Pasar-pasar dapat difungsikan kembali dengan protokol covid-19 yang ketat. Sehingga aktifitas ekonomi tidak menimbulkan penambahan jumlah orang yang terpapar. Hal ini mendesak diselesaikan untuk menggerakkan perekonomian,” ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.

Menurut Gus Ami, hal lain yang tak kalah penting untuk memulihkan ekonomi nasional adalah mengkonsolidasikan data UMKM. “Sehingga kita memiliki data komplit UMKM kita, mulai dari jenis usaha, status, dan data-data demografis lainnya. Dengan pendataan yang benar, makan jenis bantuan dan sasaran bantuan menjadi tepat sehingga menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” ungkap politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini. ■ eko/es



Wakil Ketua DPR RI Korkesra A. Muhaimin Iskandar. Foto: Istimewa/MAN



Foto bersama Tim Kunker Komisi I DPR RI dengan jajaran Makorem 064/Maulana Yusuf di Kota Serang, Banten. Foto: Jaka/MAN

# Legislator Usulkan RS Kencana Korem 064/MY Berfungsi untuk Publik

**A**nggota Komsis I DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar Rumah Sakit (RS) Kencana milik Korem 064/Maulana Yusuf, Kota Serang, Provinsi Banten berubah fungsi tidak hanya melayani para prajurit TNI saja, namun juga publik atau masyarakat secara luas. Sehingga, ketika menerima pasien umum, RS ini dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara mandiri. Peralpnya, saat ini fasilitas kesehatan dan bangunan yang dimiliki RS Kencana terlihat memprihatinkan, termasuk SDM juga sangat terbatas.

“Tentu kami sangat memperhatikan hal ini untuk segera diselesaikan. Personel dokter saja yang kiranya butuh 60 orang tapi yang tersedia hanya 5-6 orang, ini miris sekali. Hal ini menjadi *concern* kami. Ketika Rumah Sakit Kencana nantinya menjadi rumah sakit Tingkat III, maka saya mengusulkan agar berubah menjadi fungsi publik, sehingga

bisa *maintenance* SDM-nya secara mandiri,” terangnya saat mengikuti Kunker Komisi I DPR RI ke Makorem 064/MY di Serang, Banten, Jumat (17/7).

Politisi F-NasDem ini menambahkan, ke depan butuh diskusi lebih lanjut terkait porsi akan diberikan APBN kepada RS Kencana, apakah infrastruktur atau SDM. Namun di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk biaya *maintenance* juga jauh lebih besar. “Di sanalah kemudian kita akan cari untuk bagaimana rumah sakit ini bisa menjadi fungsi kepublikan,” pungkas Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Selain itu, Willy juga mengapresiasi program ketahanan nasional yang dilakukan oleh Korem 064/MY di tengah kondisi pandemi virus Corona (Covid-19). Menurutnya, kondisi ini sesuai konsep di dalam teori kemiliteran disebut demobilisasi, bagaimana TNI mempunyai SDM, dan ketika situasi tidak sedang perang bisa digerakkan pada sektor-sektor produktif, salah

satunya produksi pangan.

“Ini yang sangat kita apresiasi, tinggal bagaimana kita melakukan intensifikasi dari proses ini, *toh* Menteri Pertahanan juga sudah menjadi *leading sector* dalam mempersiapkan lumbung pangan nasional. Tentu ini harus berkoordinasi dengan kementerian teknis agar kemudian anggaran yang sangat minim, kita mencatat hanya Rp 13 juta per tahun (per Kodim), itu untuk bensin saja tidak cukup, (agar) bisa segera diatasi,” tutur Willy.

Ditambahkannya, guna merealisasikan lumbung pangan itu tentu sangat mendesak berkoordinasi dengan kementerian teknis. “Mungkin nanti kita akan coba rapat lintas Komisi dan Kementerian tentang ketahanan pangan dan bagaimana keterlibatan dari TNI dalam proses ini, karena ada diktum (pernyataan) yang mengatakan siapa yang menguasai pangan akan menguasai dunia, keterlibatan TNI menjadi penting dalam hal ini,” tutup legislator dapil Jawa Timur XI itu. ■jk/sf

# Perlu Diversifikasi Produk Menuju Pindad Berkelas Dunia

**R**encana PT. Pindad (Persero) menjadi *Top 100 Global Defense Companies* membawa perhatian tersendiri bagi Komisi I DPR RI untuk ikut terlibat aktif dalam menjalankan misi tersebut. Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi meminta kejelasan teknis PT. Pindad dalam mengadakan kerja sama dengan para *stakeholder*.

“Kerja sama Pindad dengan Ukraina untuk memperbaiki S60 kaliber 57, sedangkan S60 ini buatan Uni Soviet, Ukraina kan berbeda, nah ini apakah salah kerja sama, itu kira-kira teknis yang perlu di-*explore* lebih lanjut,” ungkap Bobby saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke PT. Pindad, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/7). Kunker Reses ini dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid.

Sementara Anggota Komisi I DPR RI Syarifuddin Hasan menekankan betapa pentingnya diversifikasi produk untuk menuju PT. Pindad berkelas dunia. “Jadi harapan kami, Pindad ini menjadi impian, bagaimana mau menjadi *top 100*, kalau anda tidak memiliki *advantage*, anda tidak memiliki *comparative advantage* dibandingkan produk-produk lain dan bagaimana anda memiliki *comparative advantage* harus banyak diversifikasi produk,” ujar Syarif.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Strategi Bisnis PT. Pindad Rizka Ariesnawan Putranto memaparkan tentang misi PT. Pindad di tahun 2024 untuk menjadi perusahaan industri pertahanan berkelas dunia (*top 100 global defence companies*). Maka dari itu, perusahaan harus



Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi saat mengikuti Kunker Komisi I DPR RI ke PT. Pindad. Foto: Singgih/MAN

mengedepankan prinsip kerja sama antar *stakeholders* agar saling sinergi.

“Industri pertahanan di *emerging states* banyak bermain di *cyber-defense* karena memang trennya menuju ke sana, *one day* di tahun 2024, Pindad memiliki misi dan visi agar Pindad menjadi salah satu di kumpulan seperti ini, di-*emerging state* dan itu cukup *possible*, bisa kita wujudkan terutama apabila *stakeholders* lain dan kerja sama antar lembaga dapat harmonis dan sangat-sangat berpihak pada industri dalam negeri ini,” jelas Rizka kepada Tim Komisi I DPR RI.

Secara total pendapatan, PT. Pindad dinilai belum mampu mencapai angka *revenue* untuk masuk dalam jajaran 100 besar perusahaan berbasis industri pertahanan kelas dunia. “Untuk menjadi perusahaan *top 100*, *revenue* yang kita harus targetkan Rp

14 (triliun) kurang lebih atau Rp 15 triliun, ini saja masih nomor 99 atau 100 dunia, sekarang saja *revenue* kita di angka Rp 3,4 triliun sampai Rp 3,5 triliun. Itu artinya kita harus 4 kali lipat atau 5 kali lipat untuk menuju ke sana,” lanjut Rizka.

Rizka menyampaikan harapannya kepada Komisi I DPR RI agar dapat mendorong mitra kerja di bidang pertahanan untuk menggunakan produk pertahanan dalam negeri. “Kami berharap, dari diskusi dengan Komisi I DPR RI, Komisi I dapat berdiskusi dengan mitra kerjanya yang bersinggungan di wilayah pertahanan dan keamanan untuk dapat berpihak pada produk dalam negeri, agar industri dapat *sustain* selalu, akhirnya kita bisa meningkatkan pasar ekspor dengan aliansi strategis baik secara G to G atau B to B,” pintanya. ■ skr/sf

# UU Pilkada Harus Ramah bagi Calon Pemimpin Potensial

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Saan menyampaikan, sejak Pilkada langsung dimulai yakni pada tahun 2005, di mana sudah terjadi 4 putaran Pilkada langsung, persoalan dinasti politik sudah terjadi sejak Pilkada langsung pertama itu dilaksanakan.

“Fenomena dinasti politik juga tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain yang demokrasinya jauh lebih maju dibandingkan negara Indonesia. Hanya bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk membentengi agar praktek politik dinasti ini tidak mereduksi kualitas personal si calon pemimpin itu sendiri,” ucap Saan dalam diskusi Forum Legislasi yang digelar di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7).

Ada beberapa catatan penting bagi Saan terkait hal tersebut. Yang pertama yaitu terkait masalah kepartaian politik di Indonesia. Ia menegaskan, sumber utama lahirnya kepala kepala daerah, sistem rekrutmennya berada di tangan partai politik (parpol).

“Partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik, baik di eksekutif maupun legislatif, turut mempengaruhi muncul atau tidaknya dinasti politik. Ke depan proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai-partai politik itu menjadi bagian penting yang harus dipikirkan bersama. Kalau memang hal ini tidak bisa dihindari oleh partai politik, minimal tidak mengabaikan apa yang namanya kompetensi seorang calon. Tidak *ujug-ujug* seketika orang yang tidak punya *track record* politik ataupun pernah mengemban jabatan-jabatan

publik muncul sebagai calon,” tandas politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Selain soal rekrutmen, sambung Saan, hal ini juga terkait dengan Undang-Undang Pilkada. Berdasarkan pengalaman dari Pilkada langsung tahun 2005 hingga sekarang, proses untuk mendapatkan dukungan maju sebagai calon kepala daerah, dengan syarat 20 persen, bagi gubernur, bupati dan wali kota, dengan kondisi negara kita yang multi partai ini, maka distribusi suara dan kursi hasil Pemilu sangat tipis sekali karena distribusinya terbagi ke banyak partai.

Hal ini tentu menyulitkan si calon untuk mendapatkan proses dukungan politik karena terlalu banyak partai dan hal itu menjadi tidaklah gampang. “Disadari atau tidak, untuk mendapatkan dukungan yang rumit karena dari banyak partai, ada juga yang namanya pasar gelap, yang notabene masalah pasar gelap ini tidak diatur dalam UU Pilkada. Karena UU

Pilkada hanya mengatur ketika seorang sudah ditetapkan sebagai calon. Tetapi untuk mendapatkan dukungan politik hal itu tidak diatur dalam UU Pilkada,” tambah Saan.

Keberadaan pasar gelap ini, lanjut Saan, juga akan mempersulit situasi bagi munculnya calon-calon kepala daerah yang memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjadi kepala daerah. Bahkan dengan kondisi multi partai ini maka diperlukan biaya atau *cost* yang tinggi untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat.

“Oleh karenanya bagaimana ke depan kita perlu memikirkan UU Pilkada ini yang ramah bagi calon-calon kepala daerah yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas politik yang memadai serta memiliki komitmen yang tinggi yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak itu mempunyai kemudahan dalam proses pencalonan dirinya tersebut,” ujar legislator daerah pemilihan Jawa Barat VII itu. ■ dep/es



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Andri/MAN



# Nurhayati Dorong Pemdes Terapkan Digitalisasi Monografi Desa

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) menerapkan Digitalisasi Monografi Desa untuk reformasi sistem. Menurut Nurhayati, Digitalisasi Monografi Desa menjadi solusi untuk dapat menganalisa dan merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui data yang berasal dari desa langsung.

Tak hanya itu, Digitalisasi Monografi Desa yang saat ini masih dilakukan secara manual diharapkan bisa membantu berbagai bidang yang dulu sangat sulit didapatkan. Demikian disampaikan Nurhayati dalam siaran persnya baru-baru ini, usai kunjungan dalam rangka Ujicoba Digitalisasi Monografi Desa untuk Mendukung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

“Saya bersama dengan Tim Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) telah melaksanakan kunjungan lapangan terkait uji coba Digitalisasi Monografi Desa. Tujuannya, untuk mendukung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Kabupaten Garut dengan salah satu desa yang dipilih adalah Desa Pasanggrahan,” ujarnya.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini menyatakan, dengan banyaknya sistem yang ada di desa yang juga kaya akan data, dapat menjadi lebih baik lagi apabila sistemnya terintegrasi dan dapat dioperasikan menjadi lebih bermanfaat bagi pembangunan desa dan juga daerah.

“Dengan dibuat menjadi digital dan disempurnakan menjadi satu sistem, data-data ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa dan juga Pemerintah Daerah agar dapat menganalisa dan merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui data,” tutur Nurhayati.

Lebih lanjut Nurhayati menyampaikan, Bappenas mengusulkan untuk membangun registrasi sosial yang mencakup 100 persen penduduk yang perlu dimulai

dari Digitalisasi Monografi Desa. Digitalisasi Monografi Desa ini akan dilaksanakan *piloting*-nya di tahun 2020 dan dilaksanakan juga disebarluaskan lagi tahun 2021.

“Kenapa desa? Karena desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi sebenarnya dari masyarakat dan lingkungannya,” pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Barat XI tersebut. ■ pun/sf

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa. Foto: Ruli/MAN



# Pembangunan KIT Batang Harus Akomodir Kepentingan Buruh

**P**embangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah harus memasukkan fasilitas primer (dasar) buruh seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pabrik agar biaya hidup buruh lebih terjangkau dan kompetitif.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Bupati Batang Wihaji, Wakil Bupati Suyono, Sekretaris Daerah. Pertemuan ini juga dihadiri para mitra kerja seperti Dirut PTPN IX, Dirut PT Pembangunan Perumahan (PT PP), Dirut PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) dan para pemangku kepentingan di Kantor Bupati Batang, Kamis (23/7).

“Saya mengingatkan KIT Batang agar tidak menjadi seperti kawasan industri di Bekasi, Cikampek dan Tangerang yang terkesan kumuh, dengan biaya hidup (living cost) buruh cukup tinggi seperti tidak dipikirkan oleh pengelola kawasan. Karena persoalan perburuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di kawasan industri dan masuk bagian dari fasilitas investor,” imbuhnya.

Ditambahkannya, kalau perumahan buruh, sarana pendidikan, kesehatan dan transportasi tidak masuk dalam perencanaan KIT Batang, maka akan mempertinggi biaya hidup pekerja. Sehingga berpengaruh pada tuntutan Upah Minimum Regional (UMR) yang menjadi beban korporasi perusahaan,” kata Aria Bima.

Legislator dapil Jawa Tengah V



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan Bupati Batang dan mitra kerja. Foto: OJI/MAN

ini menjelaskan, KIT Batang yang terkoneksi dengan jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, energi listrik, air baku dan pipa gas akan menjadi daya tarik investor asing untuk relokasi pabriknya ke Indonesia. “Sekarang tinggal PT Perkebunan Nusantara IX, PT Pembangunan Perumahan, PT Kawasan Industri Wijayakusuma dan Perumda Pemkab Batang harus mampu mensinergikan KIT Batang sebagai kawasan yang produktif,” jelas politisi PDI-Perjuangan ini.

Ia pun menyakini KIT Batang dapat meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan target regional Jawa Tengah dan capaian dengan terciptanya berbagai lapangan kerja. “Komisi VI DPR RI juga mendorong percepatan persoalan

proses alih fungsi lahan tanpa mengabaikan unsur kehati-hatian dan sesuai peraturan perundang-undangan agar segera terwujud KIT Batang, dengan mengundang BPKP dan PTPN IX di rapat komisi,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Batang Wihaji mengapresiasi kunjungan Komisi VI DPR RI yang menyepakati dan mendukung KIT Batang segera terwujud. Menurutnya, Komisi VI DPR RI satu tujuan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk penciptaan lapangan kerja. “Terpenting dalam KIT Batang fungsinya bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja dengan tidak meninggalkan sumber daya manusia masyarakat lokal untuk terlibat dan masyarakat Batang tidak tereliminasi,” pungkask Wihaji. ■ oji/es

# Krakatau Steel Perlu Restrukturisasi Perusahaan

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai PT. Krakatau Steel (Persero) perlu melakukan perbaikan baik dari segi teknologi hingga restrukturisasi perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar bisnis yang tidak efisien dapat dialih teknologikan atau dicarikan kerja sama dengan pihak lain untuk memperbaharui teknologi.

“Namun kalau memang tidak memungkinkan, ya ditutup,” kata Martin usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI meninjau PT. Krakatau Steel, di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Rabu (22/7). Dengan demikian, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah disetujui DPR RI untuk segera dilaksanakan Pemerintah dapat

memiliki prospek bisnis yang lebih baik bagi Krakatau Steel.

Di samping itu, politisi Partai NasDem itu juga menjelaskan, selain teknologi yang dimiliki Krakatau Steel diperlukan pembaharuan untuk dapat bersaing harga dengan produk luar negeri. “Krakatau Steel juga harus memikirkan bagaimana persoalan pasokan bahan baku dan energi. Sebab energi yang digunakan oleh Krakatau Steel masih mengandalkan energi listrik yang dimana Komisi VI menilai hal itu sudah tidak efisien,” ungkap legislator dapil Sumatera Utara II itu.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana menambahkan bahwa PT. Krakatau Steel merupakan simbol kebanggaan bagi masyarakat Banten. “PT. Krakatau Steel saat ini

tengah menjadi *concern* pemerintah, dengan diharapkan dapat melakukan normalisasi hidup dan bisa mulai merangkak untuk dapat memberikan angin segar bagi baja di Indonesia,” kata legislator dapil Banten III itu.

Ananta juga mengapresiasi Krakatau Steel yang telah berhasil melakukan restrukturisasi perusahaan sehingga pada akhir tahun 2019 membukukan laba sebesar Rp 1 triliun. “Salah satu yang merupakan wajah Provinsi Banten adalah Krakatau Steel, dengan demikian kemajuan Krakatau Steel juga membuat wajah Banten lebih cerah,” pungkas politisi PDI-Perjuangan ini sembari mengatakan, dengan adanya laba ini dapat berpengaruh pada tahun-tahun ke depan dalam pengurangan dukungan anggaran negara. ■ *opi/sf*



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI meninjau PT. Krakatau Steel, di Kota Cilegon, Banten. Foto: Gerald/MAN

# Pupuk Kujang Harus Revitalisasi Teknologi



Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat mengikuti Kunler Komisi VI DPR RI ke PT. Pupuk Kujang, di Karawang. Foto: Puntho/MAN

**A**nggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai fasilitas teknologi yang dimiliki PT. Pupuk Kujang sudah terlalu 'klasik'. Ia mendesak agar PT. Pupuk Kujang merevitalisasi teknologi demi mengejar produktifitas pupuk, serta menghadirkan pupuk yang baik dan murah bagi para petani nasional dalam rangka menuju kedaulatan pangan.

Hal tersebut disampaikan Herman usai mengikuti kegiatan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Gde Sumarjaya Linggih ke Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya meninjau PT Pupuk Kujang, di Karawang, Jawa Barat, Senin (20/7).

"Pupuk Kujang 1A itu dibangun pada tahun 1975. Jadi, sudah 45 tahun,



## MEREVITALISASI TEKNOLOGI DEMI MENGEJAR PRODUKTIFITAS, SERTA MENGHADIRKAN PUPUK YANG BAIK DAN MURAH BAGI PARA PETANI

kemudian yang satunya sudah 20 tahun 1B nya. Tentu, untuk mengejar produktifitas, teknologi lama sudah harus direvitalisasi. Industri pupuk harus bisa menjamin keberlangsung dalam rangka menuju kedaulatan pangan.

Juga, dalam rangka menghadirkan pupuk yang murah bagi para petani," ujar Herman lebih lanjut.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mengimbau agar PT Pupuk Kujang segera mengupayakan regasifikasi. Menurutnya, regasifikasi mendesak untuk dilakukan mengingat gas sebagai *resource* atau sumber bahan baku yang persentasenya hampir 80 persen untuk industri pupuk.

"Kami mengimbau PT Pupuk Kujang harus tersedia berkesinambungan, kalau sumber gas dalam negeri sudah mulai menurun. Mengingat, *resource* gas sebagai sumber utama hampir 80 persen untuk industri pupuk. Semestinya, bisa segera dilakukan regasifikasi. Jadi, harus dibangun dengan pihak lain," pungkas legislator dapil Jabar VIII itu. ■ pun/es

# Presiden Jokowi Seharusnya Pimpin Tim Pemulihan Ekonomi

**P**enunjukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pemulihan Ekonomi (TPE) oleh Presiden Joko Widodo ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. Sebagian kalangan optimistis penunjukan Erick Thohir sebagai Ketua TPE akan sanggup mengembalikan kondisi perekonomian Indonesia seperti sebelum diterjang pandemi virus Corona (Covid-19).

Akan tetapi, sebagian kalangan menilai kebijakan Presiden Jokowi ini tidak akan efektif membuat perbaikan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Merespon hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menyatakan, Pemerintah terlihat sangat gugup dan gagap dalam menghadapi musibah pandemi Covid-19 ini.

“Dari 5 bulan Pemerintah bekerja, tidak satu pun capaian dari strategi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berhasil,” nilai Sartono dalam siaran pers yang diterima *Parlementaria*, Kamis (23/7).

Menurut Sartono, TPE yang dibentuk ini akan membuat kinerja kementerian terganggu karena tim itu diisi oleh para menteri di kabinet. “Menteri-menteri kabinet itu digaji tidak sedikit oleh negara, jangan sampai dibentuknya satgas ini justru membuat banyak kementerian menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai, penunjukan Erick Thohir sebagai ketua tim pemulihan ekonomi akan menjadi beban

”

**PRESIDEN JOKOWI  
TIDAK KEKURANGAN  
ORANG HEBAT DI  
KABINETNYA, TINGGAL  
BAGAIMANA AGAR  
MAMPU MENYUSUN  
STRATEGI YANG TEPAT**

tersendiri bagi dirinya di tengah upaya melakukan banyak hal terkait penyehatan BUMN Indonesia. Sartono pun sebenarnya berharap tim pemulihan ekonomi ini dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

“Secara pribadi saya berharap Presiden Jokowi memimpin langsung semua upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi ini. Presiden Jokowi tidak kekurangan orang hebat di kabinetnya, tinggal bagaimana agar mampu menyusun strategi yang tepat,” tutup legislator asal dapil Jawa Timur VII ini. ■ hs/sf

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo. Foto: Azka/MAN



# Madrasah dan Pesantren di Jatim Harus Tangguh Hadapi Covid-19

**K**omisi VIII DPR RI telah menyetujui anggaran untuk bantuan operasional pesantren, bantuan operasional madrasah diniyah takmiliyah (MDT), bantuan operasional lembaga pendidikan Alquran (LPQ), dan bantuan pembelajaran online pada pesantren sebesar Rp 2,6 triliun. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik memaparkan, hendaknya anggaran yang telah disetujui Komisi VIII ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadikan pengelolaan madrasah dan pesantren tangguh menghadapi pandemi Covid-19, khususnya di Jawa Timur.

“Kebijakan anggaran yang telah disetujui oleh Komisi VIII ini, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadikan pengelolaan madrasah dan pesantren tangguh menghadapi pandemi Covid-19, khususnya di Provinsi Jawa Timur,” papar Moekhlas saat memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Masjid Merah Moekhlas Sidik, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (20/7).

Agenda rapat Kunker ini diselenggarakan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Direktur Pesantren Ditjen Pendis Kementerian Agama RI, yang mengambil tema pembahasan ‘Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Pesantren dan Madrasah’.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, tujuan tim Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Jawa Timur



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik (pertama dari kiri) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Masjid Merah, Pasuruan, Jawa Timur. Foto: Eko/MAN

ini, perlu mengetahui mengenai penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan madrasah dan pesantren. Lebih-lebih, madrasah dan pesantren telah memulai tahun ajaran baru, walau madrasah dan pesantren dapat menjadi klaster penyebaran Covid-19. “Informasi dan data penanganan dampak Covid-19 terhadap pengelolaan madrasah dan pesantren akan dijadikan rujukan Komisi VIII dalam merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Agama RI,” ungkap Moekhlas.

Moekhlas menjelaskan, penanganan terhadap pandemi Covid-19 menjadi

perhatian Komisi VIII, karena juga berdampak terhadap pengelolaan madrasah dan pesantren. Misalnya, proses belajar mengajar di madrasah dan pesantren yang awalnya secara luring atau tatap muka menjadi secara daring atau virtual.

Maka untuk, meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan madrasah dan pesantren, Komisi VIII telah menyetujui *refocusing* anggaran madrasah tahap pertama melalui revisi anggaran sejumlah Rp 9,183 dan *refocusing* anggaran pesantren tahap pertama sejumlah Rp 203 juta. ■ eko/sf

# Kanwil Kemenag DIY Diimbau Jadi *Role Model* Gerakan Modernisasi Keagamaan

**A**nggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq berharap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menjadi *role model* bagi gerakan modernisasi keagamaan di tengah radikalisme yang memanfaatkan media sosial. Tidak melulu memberikan pemaparan yang bersifat birokratif dan normatif semata.

“Saya menginginkan Kemenag Provinsi DIY dapat lebih melibatkan masyarakat, karena Yogya ini mengusung nilai moderat, toleran, dan damai. Oleh karenanya harus betul-betul menyentuh komunitas juga,” ujar Maman saat mengikuti rangkaian agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke DI Yogyakarta, Senin (20/7).

Dalam kesempatan yang sama, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu juga meminta kepada Dinas Sosial Provinsi DIY untuk memiliki *role model* agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran dan cara pendistribusiannya juga berjalan sesuai harapan.

“Kami tengah mengkritik kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang minim akan sosialisasi dan edukasi kepada publik. Oleh karena itu kami meminta masukan kepada Dinsos Provinsi Yogyakarta, bagaimana langkah yang mereka lakukan dalam mengelola bansos-bansos tersebut,” kata Maman.

Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DIY, Maman menyampaikan bahwa

Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi ekonomi dengan prediksi minus 4 persen. Untuk itu ia menginginkan agar BPBD Yogyakarta bisa menjadi proyek percontohan penanggulangan bencana alam agar Indonesia bisa selamat dari berbagai bencana yang mungkin akan terjadi.

“Dengan Covid-19 ini kita harus bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai kearifan lokal untuk menghadapi bencana. Saya ingin BPBD Yogya bisa memaparkan tentang mitigasi bencana dan memasukkan kurikulum bencana. Karena Yogya adalah daerah pendidikan. Saya menginginkan adanya satu perguruan tinggi bencana di Yogya ini,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat XI itu. ■ dep/sf



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Kanwil Kemenag DI Yogyakarta. Foto: Dep/MAN



Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI bertukar cenderamata dengan Bupati Bogor. Foto: Husen/MAN

## Komisi IX Apresiasi Pemkab Bogor

**K**omisi IX DPR RI mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bogor yang mampu mengelola pencegahan wabah virus Corona (Covid-19), sehingga tidak meluas ke tengah masyarakat. Komisi IX DPR pun ingin melihat dari dekat penanganan Covid-19 sekaligus melakukan pengawasan atas penggelontoran dana nasional Covid-19 dari pemerintah pusat sebesar Rp 405 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Bupati Bogor Ade Yasin, ingin mengetahui Pemkab setempat mengelola anggaran stimulus bagi

masyarakat terdampak Covid-19. Di sisi lain, ia juga mengapresiasi Pemkab Bogor yang sudah mendistribusikan bantuan sembako dan bantuan langsung tunai kepada warga Kabupaten Bogor yang terdampak Covid-19.

“Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk Covid-19 secara nasional berupa dana stimulus sebanyak Rp 405 triliun termasuk untuk para pelaku usaha. Sejauh mana pengawasn Pemda Bogor atas dana tersebut yang bisa dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha, sehingga tidak melakukan PHK,” tutur Elva dalam pertemuan di Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Jumat (17/7).

Anggaran tersebut juga didistribusikan untuk insentif bagi para tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Bupati Bogor sendiri dalam paparannya kepada Komisi IX DPR RI menjelaskan, pihaknya telah membentuk gugus tugas Covid-19 hingga ke tingkat RT/RW. Pemkab Bogor juga menggelar *rapid test* sebanyak 18.986 dan *swab test* sebanyak 7.200 di pusat-pusat keramaian seperti pasar, industri, terminal, stasiun, dan tenaga medis.

Masih menurut Bupati Bogor, dana bantuan sosial dan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penanggulangan Covid-19 mencapai Rp 466,709 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 199,107 miliar. Dana penanganan dampak ekonomi Rp 4,028 miliar. Dan dana penyediaan *social safety net* Rp 263,574 miliar. ■mh/sf



# Anggota DPR Dukung Penuh Peneliti UGM Ciptakan Alat Medis



Komisi IX DPR RI saat melaksanakan Kunjungan Kerja Reses ke UGM, DI Yogyakarta. Foto: Ayu/MAN

**A**nggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri mengapresiasi sekaligus mendukung penuh upaya para peneliti dari Universitas Gajah Mada (UGM) dalam membuat berbagai peralatan medis yang diperlukan bagi penderita Covid-19, maupun penyakit lainnya. Hal ini diungkapkan Abidin saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (17/7).

“Komisi IX DPR RI sengaja mengunjungi UGM untuk melihat secara langsung hasil penelitian dari para peneliti UGM seperti ventilator yang berguna bagi pasien-pasien di berbagai rumah sakit di dalam negeri, termasuk pasien penderita Covid 19. Oleh karena itu kami ingin memastikan apakah ventilator dan berbagai produk hasil penelitian tersebut bisa diproduksi secara massal. Karena sebagaimana diketahui berbagai Rumah Sakit kekurangan alat bantu nafas tersebut,” ujar Abidin

Pada kesempatan itu, lanjut politisi PDI-Perjuangan ini, Komisi IX DPR RI

mendapat penjelasan bahwa para peneliti UGM siap untuk memproduksi hasil penemuannya tersebut. Namun sayangnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian terkait seperti Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset Inovasi Nasional, kurang memberikan dukungan anggaran terhadap para peneliti UGM tersebut. Begitupun dengan penggunaan produk hasil penelitian oleh Kementerian Kesehatan.

“Kami mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran terhadap penelitian di UGM. Percuma saja penelitian jika tidak didukung oleh anggaran yang memadai, hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kami juga akan memastikan bahwa ke depan penelitian-penelitian di bidang kesehatan yang dilakukan oleh peneliti Indonesia termasuk dari berbagai Universitas harus didukung dengan anggaran yang memadai melalui Kemenristek/BRIN serta Kementerian Kesehatan,” tambahnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan mendorong Kementerian

Kesehatan, untuk mempergunakan produk-produk hasil penelitian dari peneliti UGM, serta berbagai universitas lainnya. Dimana semua itu merupakan karya anak bangsa, bukan hanya membeli dan menggunakan produk negara lain alias produk impor.

Meski demikian, yang tidak kalah pentingnya adalah riset berkaitan dengan keberadaan vaksin Covid-19. Menurutnya, selama vaksin belum ditemukan, maka Indonesia dan seluruh negara di dunia masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Oleh karena itu ia mendorong para peneliti UGM untuk menemukan vaksin yang bisa mencegah seseorang dari serangan virus Corona.

“Jika kemudian peneliti Peneliti dari UGM serta berbagai Universitas dan lembaga riset lainnya melakukan penelitian terkait vaksin Covid-19 secara bersama-sama, yang tentunya dibiayai oleh pemerintah, Saya kira para ahli dan peneliti dapat hasil penelitian yang lebih komprehensif,” pungkas Abidin. ■ ayu/es

# Aktivitas Pariwisata Harus Terapkan Protokol Kesehatan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Bandung. Foto: Anne/MAN

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Bandung, Jawa Barat kembali berjalan dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru berbasis protokol kesehatan Covid-19. Mengingat, 30 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bandung berasal dari pariwisata.

“Kami berharap Bandung sebagai *trendsetter* untuk daerah-daerah lain bisa memberikan satu pesan kepada seluruh Indonesia, bahwa kita siap bangkit kembali,” ungkap Hetifah usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Wali Kota Bandung dan jajaran di Balai Kota Bandung, Jabar, baru-baru ini.

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, Kota Bandung memiliki sejumlah potensi ekonomi di sektor pariwisata dan industri kreatif yang bisa dikembangkan. Karena itu, disiplin protokol kesehatan menjadi kunci untuk kembali menggiatkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota

Bandung. Karena itu, Pemkot Bandung harus disiplin menerapkan standar protokol kesehatan agar jangan sampai terjadi cluster baru.

Di sisi lain, para calon wisatawan juga yakin bahwa destinasi yang dituju telah memperhatikan faktor *clean*, *health* dan *safety*. “Sebetulnya sekarang sudah mulai dibuka karena sudah zona biru, tetapi karena ada kejadian Secapa TNI tentu mempengaruhi kembali paling tidak rasa aman dan percaya masyarakat. Nah, untuk itu kota harus berbenah dan mempersiapkan diri lagi, namun saya lihat berbagai langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah, saya yakin akan bisa pulih segera,” sambung Hetifah.

Sebagaimana diketahui, sektor pariwisata merupakan sektor paling awal terdampak pandemi Covid-19. Selama masa pandemi 80 persen dari 371 hotel di Kota Bandung menghentikan operasionalnya. Bahkan tingkat okupansi hotel yang beroperasi hanya 1 persen, dan 3.000 pekerja pariwisata terdampak. Kemudian, pekerja seni budaya juga

terimbas karena larangan menjalankan kegiatan di ruang publik.

Wabah Covid-19 juga secara umum telah memberi dampak signifikan bagi pekerja di ekonomi kreatif dan seni, baik di pusat maupun daerah. Berdasarkan Surat Edaran Tahun 2016 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat jumlah pelaku Ekonomi Kreatif sebanyak 126.184 orang, sebanyak 98 persen pelaku ekonomi kreatif terdampak.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Dewi Kaniyasi mengatakan pembukaan sektor wisata di Kota Bandung akan dibuka secara bertahap. Salah satu upaya Pemkot Bandung dalam meningkatkan geliat sektor pariwisata adalah dengan menggelar Bandung Great Sale lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 1 Juli - 31 Agustus 2020. Diharapkan kegiatan ini dapat membangkitkan kembali 10 persen tingkat pendapatan. ■ **ann/sf**

# Sadar Wisata Masyarakat Muara Gembong Perlu Ditingkatkan

**A**nggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mengapresiasi inisiatif masyarakat Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan potensi pariwisata daerahnya. Menurutnya, dengan berbagai potensi wisata yang dimiliki, didukung keunikan fauna yang dimiliki, yakni lutung, dapat mendukung destinasi wisatanya. Namun Putra memberikan catatan, kesadaran wisata dan komitmen masyarakat Muara Gembong dalam menjaga potensi wisata dan daerahnya perlu ditingkatkan.

“Saya mendapat laporan, pantai yang begitu indah dan bersih itu sekarang banyak terkontaminasi sampah. Makanya harus ada komitmen yang besar dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama industri. Saya rasa sadar wisata bisa dibentuk. Mereka tinggal di sini dan mereka mencintai wilayah ini. Tapi memang kesadaran masyarakat agar mereka betul-betul secara swadaya untuk menjaga wilayah itu harus ditingkatkan,” analisa Putra saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Jumat (17/7).

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, dalam mengembangkan potensi wisata Muara Gembong, tidak dapat hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga harus dibantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

(Kemenparekraf) sebagai *leading sector* pariwisata, juga harus melibatkan kementerian lain dalam pembangunan infrastrukturnya. Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ini pun, sektor pariwisata harus dapat menyakinkan wisatawan nusantara untuk berwisata dengan menerapkan *new normal*.

“Saat ini kita lagi membangkitkan ekonomi dan devisa. Yang pertama kita selamatkan adalah wisatawan nusantara. Dengan kita meyakinkan wisatawan nusantara, kita bisa menyakinkan wisatawan mancanegara. Apalagi wilayah Muara Gembong bisa dijangkau orang DKI Jakarta dan Jawa Barat, jadi menurut saya ini (memiliki) potensi (wisata). Dalam hal ini belum

terlambat kita bekerja bersama membangkitkan pariwisata di Muara Gembong,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I itu.

Sebelumnya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bekasi saat menyampaikan sambutan mewakili Bupati Bekasi mengatakan, sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Bekasi selalu mengimbangi kemajuan pembangunan Jakarta. “Potensi yang dimiliki Kecamatan Muara Gembong, di sisi utara ada bentangan laut sepanjang 72 mil, punya ekosistem mangrove yang bisa dikembangkan untuk wisata alam, dan faunanya unik. Ada lutung yang mungkin kalau kita tidak dilestarikan ke depannya bisa punah,” jelas Entah. ■sf



Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan. Foto: Sofyan/MAN

# Tim Pemulihan Ekonomi Nasional Covid-19 Dinilai Belum Urgen

**A**nggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati angkat bicara menanggapi dibentuknya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo. Komite yang diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana tersebut, saat ini membawahi dua Satgas. Pertama, Satgas Penanganan Covid-19 yang dikomandoi Kepala BNPB Doni Monardo. Kedua, Satgas PEN yang dipimpin Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

“Pembentukan tim ini rasanya belum urgen. Untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Pemerintah bisa mengoptimalkan kementerian

dan lembaga yang sudah ada. Jika tim yang ada dinilai kurang optimal dalam melakukan tugasnya, solusinya dipacu dan ditingkatkan kinerjanya bukan dibentuk tim baru. Permasalahan yang ada bukan pada kurangnya jumlah tim, akan tetapi peningkatan kinerja agar tim bisa bekerja sesuai harapan,” kata Anis melalui rilis pers kepada awak media, Rabu (22/7).

Untuk penanganan Covid-19, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan harus dipacu kinerjanya, mengingat sebelumnya sudah dibentuk juga Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Untuk pemulihan ekonomi, Kemenko Perekonomian dinilai bisa lebih difungsikan dan gugus tugas pemulihan ekonomi juga sudah dibentuk. “Jangan sampai pembentukan tim baru ini menjadi janggal. Disatu sisi ingin membubarkan 18 lembaga, tapi kemudian dibentuk tim baru,” ungkap Anis.

Anis menegaskan, pada saat ini, rakyat membutuhkan Pemerintah yang sigap. Ia berharap pemerintah lebih fokus pada aksi nyata yang berdampak

Anggota Komisi XI DPR RI  
Anis Byarwati. Foto: Arief/MAN

”

**PERMASALAHAN YANG ADA BUKAN PADA KURANGNYA JUMLAH TIM, AKAN TETAPI PENINGKATAN KINERJA AGAR TIM BISA BEKERJA SESUAI HARAPAN**

signifikan bagi rakyat. Menurutnya, hal tersebut lebih baik daripada membentuk tim dengan melibatkan sejumlah menteri yang sudah memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri yang harus dilakukan dengan optimal.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada Senin (20/7). Melalui beleid itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibubarkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 aturan tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 20 Ayat 2 huruf a, disebutkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 7 tentang penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. “Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah dibubarkan,” bunyi Pasal 20 Ayat 2 huruf b, dari Peper tersebut. ■ atw/sf



# Jelang Sidang Tahunan, Setjen DPR Koordinasi dengan Paspampres dan Setneg



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat Setjen, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Runi/MAN

**S**ekretariat Jenderal DPR RI bersama Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan Kementerian Sekretariat Negara menggelar rapat koordinasi guna membahas persiapan agenda Sidang Bersama DPR-DPD RI, Sidang Tahunan MPR RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI. Koordinasi ini meliputi penerapan protokol kesehatan, pengetatan keamanan, ketertiban acara, hingga pengaturan awak media massa.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yang memimpin jalannya rapat di Ruang Rapat Setjen, Kompleks

Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7) menyampaikan, pelaksanaan ketiga agenda tersebut dimajukan pada tanggal 14 Agustus 2020. Pasalnya, pada tanggal 16 Agustus bertepatan dengan hari libur (minggu) dan mengacu kepada Undang-Undang MD3, Sidang Tahunan dapat dilaksanakan di hari lain.

“Agenda Sidang Bersama DPR-DPD RI, Sidang Tahunan MPR RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2020 kemudian dimajukan pada 14 Agustus 2020 mendatang,” katanya. Terkait keamanan Presiden,

Wakil Presiden, Pimpinan DPR, Anggota DPR dan tamu undangan, Indra menyatakan akan memperketat protokol kesehatan Covid-19 di setiap kegiatan.

“Berkenaan dengan akan diterapkannya protokol kesehatan Covid-19, maka pada Sidang Tahunan 2020 mendatang akan menggunakan aplikasi *virtual*. Biro Pemberitaan Parlemen akan mengkoordinasikan lebih teknis. Nanti, kita menggunakan aplikasi *virtual* dengan tujuan bisa diikuti oleh Anggota Dewan atau Senator (Anggota DPD) yang tidak hadir secara fisik,” kata Indra lebih lanjut.

■ rmm/sf

# Policy Brief Identifikasi Peningkatan Reformasi Birokrasi

Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha menyatakan *policy brief* berfungsi untuk mengidentifikasi kinerja yang perlu ditingkatkan dalam sektor reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI. Ia mengungkapkan, *policy brief* didasarkan kepada hasil lembar kerja evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di tahun 2020.

Sehingga, tegas Totok, sapaan akrab Setyanta, hal itu harus betul-betul dipersiapkan agar mendapatkan nilai terbaik. Demikian dipaparkan Totok saat diwawancarai usai memimpin Sosialisasi *Policy Brief* dalam rangka aksi untuk Transformasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, di Ruang Rapat Inspektorat Utama, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7). Rapat juga digelar secara virtual.

“Nah, nilai itu apa? Antara lain, kalau untuk di pengawasan sendiri itu terkait

dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) melalui model internal *audit capability model* yang keduanya itu diamankan dalam tahun 2020 ini untuk level 3. Sehingga, kita harus mempersiapkan agar kita mendapatkan nilai yang baik,” ujar Totok.

Totok menjelaskan beberapa sektor yang menjadi indikator penilaian yaitu dari segi arsip, sistem merit, profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), indeks tentang pelayanan publik, dan tentang pengelolaan keuangan. Artinya, tegas Totok, banyak aspek-aspek penilaian sasaran antara yang harus dikejar untuk bisa mendapatkan nilai terbaik.

Tak hanya itu, Totok mengungkapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi aspek yang tak kalah pentingnya, “Nah, harapannya nanti ke depan kita sudah menyusun

rencana induk teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya, nanti tahun depan kita bisa meningkatkan nilai tersebut,” tandas Totok.

Senada, Inspektur II Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura menyampaikan *policy brief* menjadi catatan penting untuk meningkatkan kualitas organisasi terutama dalam memasuki era teknologi 4.0. “Maka, saya berpesan kepada seluruh aparatur di kesekjenan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi untuk mengoptimalkan *e-government* dan *e-parliament*,” paparnya.

Hadir secara *virtual* dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Kepala Biro Pimpinan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko, Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Danis Maya serta jajaran agen perubahan di masing-masing unit kerja di Setjen DPR RI. ■ pun/sf



Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha memimpin sosialisasi *Policy Brief* secara fisik dan virtual. Foto: Gerald/MAN



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh memimpin Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau pembangunan RS Pakulonon, di Serpong Utara, Tangsel. Foto: Erman/MAN

# Komisi IX Apresiasi Pembangunan Rumah Sakit Kelas III di Tangsel

**W**akil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang tengah membangun Rumah Sakit Pakulonon. Dimana, RS ini kelak hanya akan menerima pasien BPJS Kesehatan kelas III dan tanpa diskriminasi seperti yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Hal ini dikatakan Ninik, sapaan akrabnya, saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi IX DPR RI meninjau progres pembangunan RS Pakulonon, di Serpong Utara, Tangsel, Sabtu (18/7). “Jadi kalau kita kembali ke undang-undang dasar, bahwa seluruh masyarakat harus mendapatkan akses dari kesehatan. Kita mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Pakulonon ini,” ungkapnya.

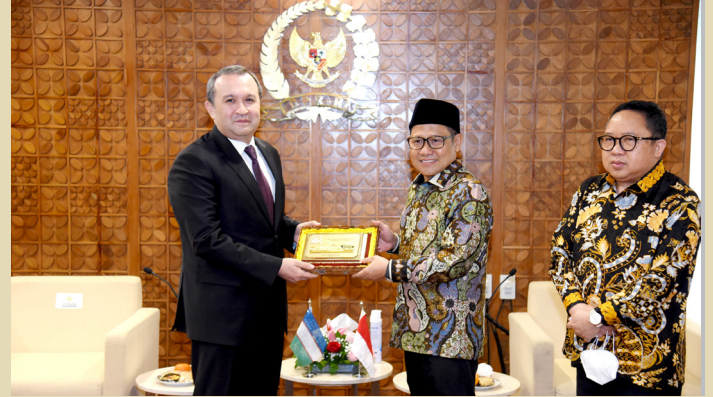
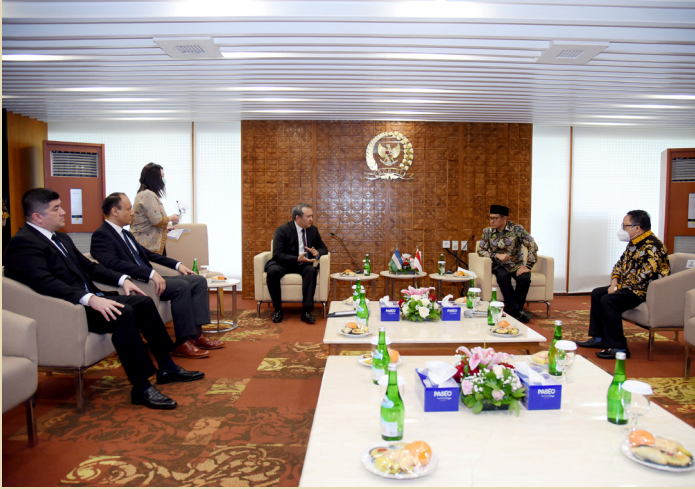
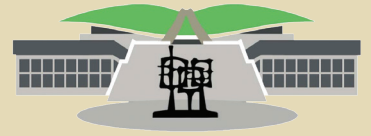
Politisi Fraksi PKB ini mengungkapkan, selama ini ia kerap mendengar keluhan dari masyarakat yang menganggap pelayanan bagi pasien kelas III kurang baik, ada diskriminasi, antri BPJS yang lama dan lainnya. “Sebenarnya kita di Komisi IX sudah seringkali teriak-teriak, bagaimana agar rumah sakit bisa menerima seluruh pasien,” ungkapnya.

Ia berharap pembangunan RS Pakulonon ini dapat dicontoh daerah lain, agar pemerintah daerah mulai memikirkan konsep rumah sakit dengan biaya perawatan murah, tanpa memandang status kepesertaan JKN, dan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. “Kalau nanti rakyatnya banyak yang kelas III, berarti RS atau fasilitas kelas III harus diperbanyak,” pintanya.

Di Indonesia sendiri, lanjut Ninik,

belum banyak daerah yang bisa membangun RS kelas III seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Tangsel. Butuh keberanian dari pemerintah kabupaten dan kota untuk mengambil langkah seperti ini, mengingat laba dari kepesertaan JKN kelas I dan II biasanya untuk menutupi pembiayaan di kelas III.

Kembali ke progres RS Pakulonon, Ninik sedikit terkejut mengetahui *deadline* pembangunan RS ini pada bulan Desember 2020. Ia mengatakan, Komisi IX DPR RI akan terus *support* agar pembangunan ini bisa rampung tepat waktu. “Dan kita akan *support* secara alat kesehatannya, dan lain hal yang bisa kita *support*, agar menjadi percontohan bagi daerah lain,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III ini. ■ es



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menerima Dubes Uzbekistan di Ruang Delegasi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7). Foto: Jaka/MAN



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 19 Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta (29/7). Foto: Arief/MAN



Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI Suratna dan Ketua KORPRI Setjen DPR RI Indra Pahlevi foto bersama usai menyerahkan santunan untuk yatim di Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7). Foto: Runi/Man

